



**EFEKTIVITAS *POLICE TO POLICE COOPERATION*  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
KEPOLISIAN FILIPINA DALAM MEMBERANTAS TINDAK  
KEJAHATAN PENYELUNDUPAN SENJATA API ILEGAL**

**Jasmin Michael Gultom**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstract**

Illegal arms smugglings is a crime that possessed a tangible threat. An act of brought in firearms illegally from one territory to another will ignite threats to the destined territory. Crimes such as armed robbery, armed vigilante action and terrorism are frequent phenomena appeared followed by the increasing spread of illegal firearms in a region. Preventing crimes that resulted from illegal firearms and eradicate illegal arms smuggling are police main objectives. The firearms that need to be eradicate came from Philippines and smuggled to Indonesia. Those illegal firearms contributed armed criminals from street thugs all the way to organized terrorist group. Cooperation between Indonesia National Police and Philippines National Police is an effective solution to eradicate widespread of illegal firearms from Philippines. Knowing how effective the cooperation between Indonesia and Philippines police force is the main purpose of this research. Utilize liberalism theory on viewing cooperation and police to police cooperation concept, researcher seeks the answer from formulation of the problem that questioning of how effective the cooperation.

**Keywords:** *illegal firearms smuggling, cooperation, effective, Philippines*

**Pendahuluan**

Kejahatan konvensional merupakan jenis kejahatan umum yang sering terjadi di masyarakat dengan motif dan latar belakang yang umum seperti keterbatasan kemampuan ekonomi. Kejahatan konvensional dilakukan dengan berbagai sarana, salah satu yang paling mengkuatirkan adalah kejahatan konvensional yang dilakukan dengan melibatkan senjata api, tindak kejahatan tersebut sangat berbahaya karena dapat menyasar siapapun dengan latar belakang apapun. Beberapa tindak kejahatan yang menjadi kekhawatiran akibat penggunaan senjata api secara ilegal adalah tindakan seperti aksi terorisme hingga aksi sederhana tapi memiliki motif yang rumit seperti penembakan terhadap suatu individu. Kejahatan tersebut seringkali melibatkan senjata api sebagai sarana. Senjata api yang digunakan untuk kejahatan tersebut tidak mungkin senjata yang terregistrasi karena akan mudah dilacak oleh kepolisian. Pelaku memerlukan senjata api yang bersih dari pelacak dan tidak pernah diregistrasi, maka dari itu senjata api ilegal menjadi pilihan utama dan sebuah kebutuhan utama. Kebutuhan akan senjata api ilegal menciptakan terjadinya permintaan akan senjata api ilegal. Permintaan yang semakin besar akan menciptakan peningkatan pada pesanan dan berimbas pada peningkatan produksi. Semua fenomena tersebut akan mendorong para pengrajin untuk memperbanyak produksi senjata api ilegal. Semua pernyataan diatas menciptakan sebuah pernyataan baru, bahwa untuk

menghentikan atau mengurangi dalam jumlah signifikan tindak kejahatan yang dibahas di atas, sumber daya utama penyokong kejahatan tersebut harus dihilangkan, yang merupakan senjata api ilegal.

Pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut. Berdasarkan Lampiran "J" Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia, tugas Set NCB-Interpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama/koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnational juga menyelenggarakan kerjasama internasional/antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan "Peace keeping operation" di bawah bendera PBB.

Kerjasama Indonesia dengan Filipina memasuki lingkup kerjasama strategis pada bidang keamanan sejak tahun 2002. Menindak lanjuti butir pembicaraan antara Presiden Megawati dengan Presiden Gloria Macapagal Arroyo mengenai kesepakatan bersama untuk meningkatkan kontribusi dalam memelihara keamanan di perbatasan kedua negara. Menandai keinginan tersebut, maka pada pertemuan ke-3 Komisi Bersama Indonesia-Filipina, pada tanggal 21-22 Desember 2002, pihak Filipina dalam *Working Group on Security Border and Defense, Police and Border Cooperation* telah mengajukan draft *Memorandum of Understanding on Cooperation on the Law Enforcement* atau dalam bahasa Indonesia disebut Nota Kesepahaman Kerjasama Pengegak Hukum. Membahas rencana tersebut sebuah pertemuan antara Kuasa Usaha ad Interim KBRI Manila bersama staf dengan *Executive Director of Philippines Center for Transnational Crime*, Letjen (Pol) Florenso Pianza diadakan. Hasil dari pertemuan tersebut menciptakan usulan untuk dibentuknya *Joint Working Group* untuk meneliti kembali, mendudukan permasalahan pada institusi yang berwenang dan membahas serta menyempurnakan draft MoU.

Tanggal 18 November 2005 adalah penanda dari hasil kelompok kerja yang dibentuk pada 2002 lalu dan sebuah pencapaian baru dari kerjasama strategis Indonesia dengan Filipina. Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Sutanto dan Kepala Kepolisian PNP Pol Dir Gen Arturo C Lomibag menandatangani nota kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Nasional Filipina dalam Kerjasama Mencegah dan Memberantas Kejahatan Transnasional. Nota kesepahaman tersebut memiliki jangka waktu berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa jauh keberhasilan kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Filipina dalam memberantas kejahatan transnasional, dalam penelitian ini terkhusus pada tindak kejahatan penyelundupan senjata api kecil dan senjata ringan.

Penelitian ini menggunakan konsep Liberalisme dalam memandang kerjasama dan konsep kerjasama antara kepolisian (*Police to Police Cooperation*). Pandangan liberalisme diperlukan untuk menjelaskan mengapa aktor dua kepolisian dari dua negara berbeda memutuskan untuk melakukan kerjasama strategis. Berdasarkan tulisan Immanuel Kant yang berjudul "*Perpetual Peace*" atau diterjemahkan perdamaian abadi, dua aktor berdaulat dapat melakukan kerjasama dan menurunkan ego masing-masing saat dihadapkan pada ancaman besar yang mengancam kedua pihak. Konsep mengenai kerjasama antara kepolisian digunakan untuk menjelaskan bagaimana dua kepolisian dari dua negara berbeda dapat bekerjasama dan saling berbagi informasi strategis.

## Pembahasan

Modus penyelundupan senjata api ilegal dari Filipina paling banyak dengan menggunakan jasa pengiriman barang atau jasa ekspidisi. Senjata api laras panjang siap pakai yang telah diurai, komponen senjata, dan amunisi melalui proses kamuflase menjadi berbagai bentuk paket yang sering dikirim orang awam melalui jasa pengiriman barang seperti komponen kendaraan bermotor atau elektronik. Senjata api laras pendek siap pakai akan dikamuflase menjadi terlihat seperti senjata mainan dengan tipe *Airsoft* dengan mengganti bagian dalam yang bertugas meluncurkan peluru dan pelatuk yang diganti. Senjata akan terlihat seperti senjata mainan anak-anak pada umumnya dengan ditambah warna cat yang diganti. Komponen-komponen yang telah dipindahkan dan dilepas akan dikamuflase dalam kotak-kotak barang elektronik seperti kotak penyimpanan telepon genggam, radio, CPU komputer dan pemutar DVD (Baintelkam, 2017). Contoh kasus dari modus penyelundupan tersebut adalah tindakan yang terjadi pada tanggal 16 Mei dan 7 Juni 2012 di Surabaya. Pihak bea cukai bandara menahan perangkat elektronik yang terlihat mencurigakan saat memasuki mesin *X-ray*. Penjelasan mengenai modus yang digunakan penyelundup senjata api dengan menggunakan bagian luar perangkat elektronik dan menyembunyikan komponen-komponen senjata api berasal dari paparan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia. Paparan oleh Baintelkam disampaikan pada rapat kelompok kerja dalam rangka pembuatan bahan pertemuan Asenapol 2017.

Modus penyelundupan lain yang kerap digunakan kelompok penyelundup dari Filipina seperti kelompok teroris Anshorut Khliafah adalah mencampur komponen-komponen, amunisi dan senjata api yang telah diurai ke dalam barang yang dibawa oleh warga saat menumpang kapal. Senjata api jenis laras panjang akan diurai dengan dipisahkan bagian laras, komponen pelatuk dan kotak amunisinya. Bagian laras senjata api yang berbentuk panjang akan disembunyikan di dalam karung yang biasa berisi bahan-bahan mentah untuk dijual di pasar seperti buah-buahan atau sayur-sayuran. Komponen-komponen lainnya serta amunisi akan disembunyikan dalam tas-tas yang berisi pakaian dengan menyembunyikan amunisi atau kotak amunisi ke dalam kantong-kantong yang dimiliki pakaian.

Senjata api ilegal dari Filipina masuk ke dalam wilayah Indonesia dikirim melalui jalur laut. Penyebaran senjata api ilegal dari Filipina di dalam wilayah Indonesia dilakukan melalui jalur laut, darat dan udara. Jalur laut merupakan pilihan utama bagi penyelundup senjata api ilegal dari Filipina. Pemilihan jalur tersebut didasari keadaan geografis Indonesia dengan Filipina. Pelabuhan Buang di Pulau Biaro milik Indonesia dan pelabuhan General Santos milik Filipina memiliki jarak yang masih dapat dicapai dengan kapal motor ukuran kecil dan menengah. Senjata-senjata api ilegal yang berhasil memasuki wilayah Indonesia akan disebarkan dari pelabuhan-pelabuhan melalui jalur laut, darat dan udara. Jalur darat dipilih karena senjata dapat dibawa melewati perbatasan antar provinsi menggunakan mobil dikarenakan rendahnya pengamanan perbatasan antara provinsi Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur yang membuat senjata api ilegal dapat masuk hingga ke kota Samarinda.

Contoh jalur lain adalah pelabuhan kecil di Pulau Tarakan dan Nunukan dimana barang-barang dikirim dari pelabuhan di General Santos atau jalur lain melalui Malaysia terlebih dahulu dengan wilayah spesifik Pulau Timbun Mata atau wilayah Kunak dengan target utama adalah pelabuhan yang biasa digunakan oleh nelayan-nelayan tradisional, senjata kemudian dibawa masuk ke Kalimantan melalui jalur darat. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat awam akan beragam cara dan modus penyelundupan senjata api ilegal juga berkontribusi besar. Pengetahuan dan pemahaman akan modus-modus dan cara-

cara penyelundupan senjata api ilegal perlu diberikan terutama pada pegawai penyedia jasa ekspedisi dan penyedia jasa pengiriman barang yang berlokasi di wilayah rawan menjadi tujuan penyelundup untuk memasukkan senjata api ilegal.

Tindak penyelundupan senjata api ilegal dari Filipina berperan dalam serangkaian kasus terorisme yang dilakukan kelompok radikal dan kelompok separatisme yang berada di Indonesia. Senjata-senjata ilegal dari Filipina sebagian besar memiliki tujuan akhir di bagian Timur Indonesia seperti Makassar, Poso dan Papua. Wilayah-wilayah tersebut merupakan tempat yang memiliki jumlah konflik bersenjata yang banyak

Kelompok terorisme milik Santoso yang bermarkas di Poso, Sulawesi Tengah merupakan salah satu kelompok terorisme yang berakar dari ajaran radikalisme yang mendapat keuntungan dari senjata api ilegal yang berasal dari Filipina. Kelompok radikal yang dipimpin oleh Santoso dengan nama alias Abu Wardah merupakan kelompok radikal yang bernama Mujahidin Indonesia Timur atau biasa disingkat MIT.

Kelompok MIT telah lama ikut menciptakan teror di wilayah bagian timur Indonesia khususnya di provinsi Sulawesi dengan mengatasnamakan agama Islam. Kelompok ini memiliki markas utama mereka di sebuah hutan di gunung Langka sekitar Poso. Kelompok MIT milik Santoso mendapatkan semua persenjataan yang diperlukan dari Filipina, karena afiliasi mereka dengan kelompok radikal yang berada di Filipina yang bernama Anshorut Khilafah yang dipelopori oleh Abu Sharifah. Kelompok Anshorut Khilafah merupakan jaringan dari kelompok *Islamic State* yang berbasis di Suriah dan mengembangkan jaringannya ke Filipina (Kompas Online, 2015).

Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Nasional Filipina dalam berbagi informasi inteligensi menciptakan keberhasilan bagi Kepolisian Nasional Filipina menangkap beberapa anggota Anshorut Khilafah. Penangkapan dapat terjadi setelah Densus 88 Antiteror milik Polri berhasil menangkap penyelundup yang membawa masuk senjata api ilegal dari Filipina ke dalam Indonesia. Jenis senjata beserta amunisi yang disita berupa M16 beserta dengan 4 magasin, 200 butir peluru senjata M16, sepucuk senjata Berreta Sniper kaliber 50, 20 butir peluru kaliber 50, satu buah granat nanas, satu buah roket mini Bukttap dengan kode Ava 0069-89, dan 16 butir amunisi yang ukurannya lebih kecil dari amunisi FN 45 (Detik News Online, 2015). Melalui interograsi pihak Kepolisian Republik Indonesia mengetahui kelompok MIT mendapatkan senjata api ilegal dari Filipina dan lebih tepatnya dari kelompok Anshorut Khilafah. Berdasarkan MoU sejak tahun 2005, Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Filipina sepakat saling bekerjasama dan berbagi informasi strategis untuk memberantas perdagangan senjata api ilegal. Informasi yang diberikan Kepolisian Republik Indonesia membuat Kepolisian Nasional Filipina dapat menangkap enam tersangka di Quezon City yang merupakan anggota Anshorut Khilafah.

Papua memiliki reputasi terkenal sebagai wilayah konflik bersenjata yang aktif. Konflik bersenjata terjadi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kelompok-kelompok separatis di Papua. Penumpasan kelompok separatis di Papua menjadi agenda penting dan pekerjaan rumah pemerintah Indonesia yang masih dalam tahap penyelesaian (Liputan 6 online. 2014). Kelompok-kelompok separatis di Papua memiliki keuntungan karena lebih mengenal wilayah geografis Papua dibandingkan kepolisian atau tentara yang diterjunkan yang masih harus mempelajari melalui peta. Penggunaan hutan bagian dalam yang terletak di pegunungan merupakan strategi yang dipilih kelompok-kelompok separatis dalam membangun pusat komando atau markas besar. Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan salah satu kelompok separatis yang terkenal dan memiliki pengikut yang banyak.

Penggagalan usaha tindak penyelundupan senjata api ilegal dari Filipina ke wilayah Papua, khususnya Paniai, Papua Tengah pada 1 Juli 2014. Kepolisian Papua menyebut

penyelundupan senjata api dari Filipina diduga untuk kelompok kriminal bersenjata yang ada di Paniai, yang saat ini dipimpin oleh Leo Yogi. Dalam penyelidikannya, senjata tersebut dibeli melalui jalur laut lewat Tobelo, Maluku Utara dan tembus ke wilayah Filipina bagian selatan. Senjata tersebut dibeli dengan modal Rp 120 juta (Portal Berita KBR, 2014). Dananya diduga diperoleh dari hasil pemalakan perusahaan tambang di daerah itu. Kapolda Papua, Tito Karnavian menuturkan senjata tersebut dipasok oleh tiga orang yakni Simon Kararbo, warga Supiori dan dua rekannya yakni Manase Wesara dan Roger Koloba warga Tobelo. Jenis senjata yang diselundupkan berupa satu pucuk senjata laras panjang jenis AR 15, satu FN-45, dan satu revolver. Total jumlah amunisi yang berhasil disita sebanyak 100 butir (Portal Berita KBR, 2014).

Jakarta sebagai ibu kota dari Indonesia juga tidak terlepas dari dampak senjata api ilegal dari Filipina. Aksi teror yang dilakukan sekelompok orang di wilayah Sarinah di Jakarta merupakan aksi teror paling mengejutkan sepanjang tahun 2016. Sebuah aksi penyerbuan terhadap pos polisi lalu lintas yang berakhir dengan salah satu pelaku melakukan aksi bom bunuh diri. Aksi teror tersebut dinyatakan paling mengejutkan karena dilakukan pada jam sibuk aktivitas warga Jakarta terutama pegawai kantor di sekitaran Sarinah. Terjadi pada tanggal 14 Januari 2016, aksi teror mulai terekam dimulai pada pukul 10.40 WIB. Total terjadi enam ledakan selama pukul 10.40 WIB hingga sekitar pukul 11.20 WIB. Memakan korban hingga enam orang meninggal dunia, pelaku yang berjumlah tujuh orang berhasil dilumpuhkan sebanyak empat orang dengan tiga orang sisanya tewas dalam baku tembak.

Portal berita BBC Indonesia memberikan klaim aksi bom Sarinah sebagai aksi teror paling besar terhadap Indonesia sejak bom yang terjadi pada 17 Juli 2009 yang terjadi di dua hotel di wilayah Kuningan. Tindakan terorisme yang dilakukan di wilayah Sarinah juga menggunakan senjata api ilegal dari Filipina. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Badrodin Haiti memastikan senjata yang digunakan untuk melancarkan aksi teror pada tanggal 14 Januari berasal dari Filipina. Dua hari setelah kejadian perkara, Kapolri mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat, yang menyatakan senjata api ilegal dari Filipina terlibat dalam aksi teror pada 14 Januari 2016. Kejadian teror tersebut memperbanyak daftar aksi kejahatan yang terjadi di Indonesia akibat senjata api ilegal dari Filipina. Menanggapi kejadian tersebut biro konvensi internasional dalam divisi hubungan internasional milik Kepolisian Republik Indonesia memberikan prioritas pada program kerjasama dalam menangani aksi terorisme dan penanganan kejahatan di perbatasan dengan Filipina.

## **Kesimpulan**

Kepolisian Republik Indonesia telah menjalin kerjasama strategis dengan Kepolisian Nasional Filipina sejak tahun 2005. Meningkatkan kualitas bentuk kerjasama dengan Kepolisian Nasional Filipina merupakan langkah yang pasti ditempuh bila kerjasama antara kedua kepolisian terbukti efektif. Mengacu pada data-data yang ditemukan selama penelitian terhadap kerjasama Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Nasional Filipina dalam memberantas peredaran senjata api ilegal. Peneliti menyimpulkan kerjasama kedua kepolisian sangat efektif. Efektivitas dari kerjasama kedua kepolisian terlihat dari hasil tindak pemberantasan peredaran senjata api ilegal yang berusaha masuk ke wilayah Indonesia dari Filipina. Tahun 2014 merupakan tahun dengan jumlah tindak penangkapan penyelundup senjata api ilegal dari Filipina terbanyak dengan jumlah tiga kasus. Tahun 2015 menjadi data penguat efektivitas kerjasama kedua kepolisian dengan pembubaran kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur dan eksekusi yang dilakukan terhadap Santoso yang merupakan pemimpin dari MIT.

Bentuk dari kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Nasional Filipina diawali dengan pembentukan PHILINDO PJCM. Forum tersebut merupakan wadah bagi Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Nasional Filipina melakukan pertukaran informasi intelijen dan pertukaran ilmu-ilmu kepolisian. PHILINDO PJCM menjadi langkah besar pertama kedua kepolisian menuju bentuk kerjasama yang strategis dan efektif. Melalui pertemuan-pertemuan formal pada PHILINDO PJCM dan forum-forum lain, kedua kepolisian merencanakan beragam program bersama yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Program-program yang telah direncanakan dan disepakati kedua pihak adalah (1) Pertukaran informasi intelijen, pertukaran informasi intelijen mengenai kejahatan-kejahatan transnasional yang urgen. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sesi tertutup secara formal pada PHILINDO PJCM, (2) Pelatihan bersama dalam menangani kejahatan transnasional, pelatihan bersama yang terbagi dalam dua jenis seperti (a) Pelatihan bersifat operasi bersama, (b) Pelatihan bersifat pertukaran ilmu kepolisian, metode penggalan tindak kejahatan, dan metode penyerahan dan penahanan tersangka yang sesuai hukum berlaku di negara asal kedua kepolisian.

Kerjasama yang menguntungkan tersebut menjadi salah satu alasan kuat Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Nasional Filipina menyangkut kerjasama strategis mereka. Penandatanganan Nota Kesepahaman terbaru telah dilakukan kedua kepolisian di Manila, Filipina pada tanggal 22 Juni 2017.

## Referensi

- Armed and Dangerous More Civilians Own Guns Than Military and Police*. Dalam <http://news.abs-cbn.com/nation/01/29/11/armed-and-dangerous-more-civilians-own-guns-military-and-police> diakses pada 16 Mei 2017.
- Capie, David. 2001. 'Sovereignty Under Fire: Small Arms Smuggling in Southeast Asia.
- Capie, David. 2002. *Small Arms Production and Transfers in Southeast Asia*. California: Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University.
- Chao, Steve. 2014. *Stray Bullets: Guns In Philippines*. Al Jazeera English, Philippines. 29 Menit.
- Cockcroft, L., *Global Corruption: Money, Power and Ethics in the Modern World*, I.B.Tauris, London & New York, 2014, Ch. 1. [R].
- Erdianto, Kristian. *Pemerintah Waspadai Kontak MILF Filipina dengan Teroris di Indonesia*. Dalam. <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/12311151/pemerintah.waspadai.kontak.milf.filipina.dengan.teroris.di.indonesia>. diakses pada 17 Desember 2017.
- Gracia, Bong. *Police Seize 348 Firearms*. 2016. Dalam <http://www.sunstar.com.ph/zamboanga/localnews/2016/05/04/zamboanga-police-seize-348-firearms-471710> diakses pada 8 Juni 2016.
- Haryanto, Andri. 2015. *Ini Rute Daeng Koro Selundupkan Senjata Api dari Filipina ke Sulawesi*. Dalam. <https://news.detik.com/berita/2878941/ini-rute-daeng-koro-selundupkan-senjata-api-dari-filipina-ke-sulawesi>. diakses pada 17 Desember 2017.
- Illegal Possession of Firearms Must be non-bailable offense-police*. Dalam <http://newsinfo.inquirer.net/67449/illegal-possession-of-firearms-must-be-non-bailable-offense%E2%80%94police> diakses pada 16 Mei 2017.
- Kramer, Katherine. 2001. *Legal to Illegal: Southeast Asia's Illegal Arms Trade*. Dalam. *Kasarinlan: A Quarterly Publication of the Third World Studies Center*. University of Philippines.

- Lita, Katarina. 2014. *Polda Papua: Kelompok Kriminal Paniai Beli Senjata dari Filipina*. Dalam [http://kbr.id/07-2014/polda\\_papua\\_kelompok\\_kriminal\\_paniai\\_beli\\_senjata\\_dari\\_filipina/66618.html](http://kbr.id/07-2014/polda_papua_kelompok_kriminal_paniai_beli_senjata_dari_filipina/66618.html) diakses pada 18 Desember 2017.
- Merdeka. 2013. *Teroris yang Tewas di Makassar Beli Senjata Api di Filipina*. Dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/teroris-yang-tewas-di-makassar-beli-senjata-api-di-filipina.html>. diakses pada 18 Desember 2017.
- Merdeka. 2013. *Teroris yang Tewas di Makassar Beli Senjata Api di Filipina*. Dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/teroris-yang-tewas-di-makassar-beli-senjata-api-di-filipina.html>. diakses pada 18 Desember 2017.
- Philippines Black Market For Guns Thrives In Absence of Trust In Security Forces*. Dalam [http://www.huffingtonpost.com/2013/04/11/philippines-guns-black-market\\_n\\_3058567.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/04/11/philippines-guns-black-market_n_3058567.html) diakses pada 16 Mei 2017
- Santos, Soliman dan Pas Verdades Santos. 2010. *Primed and Purposeful: Armed Groups and Human Security Efforts in the Philippines*. Dalam. Quilop, Raymund. *Small Arms and Light Weapons in the Philippines: Possession, Demand, Supply, and Regulation*.